

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KUTAI BARAT

TEODOTA BUYON, LCA Robin Jonathan, Imam Nazarudin Latif

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.
Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75234, Indonesia.
E-mail: teodotabuyon@untag-smd.ac.id

ABSTRACT

TEODOTA Buyon, Contribution To The Local Tax revenue (PAD) West Kutai. Under the guidance of (Mr. LCA.Robin Jonathan as a supervisor I and Mr. Imam Nazarudin Latif as mentors II).

Based on data from the low contribution of Local Tax Revenue In Kutai Barat regency which is visible from the realization of a low in 2009 of 43.46%. Then conducted in-depth research on the Contributions of Local Taxes Against Local Revenue.

The purpose of this study was to determine the Regional Tax Contributions to the Local Revenue Kutai Barat in 2010 up to 2012, and determine taxes that contribute most to the original income Kutai Barat in 2010, 2011, and 2012.

Mechanical data collection in this research is the study of literature, which takes secondary data including documents and supporting data derived from Revenue Kutai Barat is calculated using the formula Contributions ie by comparing the total revenue realization of Local Taxes in a given year by the total actual revenues Revenues (PAD) in a given year multiplied by one hundred.

Based on the analysis and discussion, it is known that the contribution of Local Tax Revenue Kutai Barat to the area in 2010 amounted to 20.45%, in 2011 was 24.68%, and in 2012 amounted to 21.99% means the Local Tax Contributions to the regional revenue still low. According to data that have been processed from the Administration Section at the Department of Revenue Receipts Kutai Barat, it is known that the realization of local taxes in 2010 amounted to 94.33%, in the year 2011 was 85.95% and in 2012 amounted to 82.13 %. Types of tax contributed the most in 2010 were the Tax Collection Gol.C Excavated in 2011 is Tax Tax on Acquisition of Land (BPHTB), and in 2012 is the restaurant tax.

Based on these explanations, it can be concluded that the Regional Tax Kutai Barat has not contributed target. It can be seen from the achievement of the target of 2010 which was not realized 100%, and saw the same thing in 2011 and 2012 and even tended to decrease, this decrease may be caused by the increase in the target value is increased from the year 2010 until 2012.

Hypothesis "advertisement tax, amusement tax, hotel tax, restaurant tax, street lighting tax, Tax Decision Excavation Gol.C, Taxes swallow's nests, Ground Water Tax and Customs Acquisition Rights to Land (BPHTB) already contribute on target against Revenue West Kutai Regency "rejected. The second hypothesis, which contributes the largest tax in 2010, 2011, and 2012 is the Tax Decision Gol.C Excavation was also rejected.

Keywords: Contributions, Local Taxes, Local Revenue.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-undang No.47 tahun 1999, merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk

kelangsungan dan kemajuan daerahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai barat melalui SKPD terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah berupaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah secara maksimal. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Asset Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan Pajak

Daerah Kabupaten Kutai Barat terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Galian Golongan C, Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet (SBW), Pajak Air Tanah (PAT) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Daerah yang memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kutai Barat diantaranya adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Restoran. Menurut data dari Dinas Pendapatan Daerah Kutai barat Sejak tahun 2008 hingga 2010 pajak yang memberikan kontribusi paling besar adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C. Secara keseluruhan Pajak Daerah Kabupaten Kutai Barat belum memberikan kontribusi secara maksimal. Hal ini bisa terlihat dari realisasi yang rendah pada tahun 2009 yaitu hanya sebesar 43,46%.

II. DASAR TEORI

Akuntansi Sektor Publik menurut Renyowijoyo (2008) adalah sebagai berikut : “Sistem akuntansi yang di pakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik”.

Abdul Halim (2008 ; 35) memberikan definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah adalah : Proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas

pemerintah daerah (kabupaten, kota atau propinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Warsito (2001:128) adalah sebagai berikut : Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersuber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2000) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2003: 98) pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut Yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

III. METODE PENELITIAN

Kontribusi pajak daerah dihitung menggunakan rumus Abdul Halim (2004) Rumus Kontribusi :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun ke n}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD tahun ke n}} \times 100 \%$$

\sum Realisasi Pajak Hotel

$$\begin{aligned}
\text{a. Kontribusi Pajak Hotel} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\sum \text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\
\text{b. Kontribusi Pajak Restoran} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\sum \text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\
\text{c. Kontribusi Pajak Hiburan} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\sum \text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\
\text{d. Kontribusi Pajak Reklame} &= \frac{\sum \text{Realisasi Pajak Reklame}}{\sum \text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\
\text{e. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan} &= \frac{\sum \text{Realisasi Pajak PJ}}{\sum \text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\
\text{f. Kontribusi Pajak Pengambilan Galian Gol.C :} & \\
&= \frac{\sum \text{Realisasi Pajak Pengambilan Galian Gol.C}}{\sum \text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\
\text{g. Kontribusi Pajak Air Tanah} &= \frac{\sum \text{Realisasi Pajak Air Tanah}}{\sum \text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\
\text{h. Kontribusi SBW} &= \frac{\sum \text{Realisasi Pajak SBW}}{\sum \text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\
\text{i. Kontribusi BPHTB} &= \frac{\sum \text{Realisasi BPHTB}}{\sum \text{Realisasi PAD}} \times 100 \%
\end{aligned}$$

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan total Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2010, 2011 dan 2012 :

Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2010 :

$$\begin{aligned}
\text{Kontribusi Pajak Daerah} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\
&= \frac{\text{Rp } 7.823.571.522,08}{\text{Rp } 38.249.153.244,35} \times 100 \% \\
&= 20,45\%
\end{aligned}$$

Pada perhitungan di atas pada tahun 2010 Kontribusi Pajak Daerah adalah sebesar 20,45%

Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2011 :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Rp 14.989.879.664,09}}{\text{Rp 60.730.465.402,18}} \times 100\%$$

$$= 24,68\%$$

Pada perhitungan di atas pada tahun 2011 Kontribusi Pajak Daerah adalah sebesar 24,68%

Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2012 :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Rp 14.931.966.376,52}}{\text{Rp 67.904.531.799,35}} \times 100\%$$

$$= 21,99\%$$

Pada perhitungan di atas pada tahun 2012 Kontribusi Pajak Daerah adalah sebesar 21,99%

Tabel Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dari tahun 2010 – 2012

NO	PAJAK	KONT-RIBUSI TH 2010	KONT-RIBUSI TAHUN 2011	KONT-RIBUSI TAHUN 2012
1	HOTEL	0,17%	0,12%	0,14%
2	RESTORAN	2,54%	4,51%	9,44%
3	HIBURAN	0,08%	0,07%	0,06%
4	REKLAME	0,16%	0,21%	0,16%
5	PENERANGAN JALAN	5,96%	3,24%	2,85%
6	PENGAMBILAN GALIAN GOL.C	11,15%	2,84%	2,54%
7	AIR BAWAH TANAH	-	0,12%	0,29%

8	SARANG BURUNG WALET	0,39%	0,22%	0,23%
9	BPHTB	-	13,36%	6,29%
JUMLAH		20,45%	24,68%	21,99%

(Sumber : Hasil Diolah)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. kontribusi Pajak Daerah Kutai Barat masih rendah, hal ini dapat dilihat dari perhitungan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 20,45%, tahun 2011 sebesar 24,68% dan sampai 2012 sebesar 21,99%.
2. Pajak Daerah Kutai Barat belum berkontribusi sesuai target. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi tahun 2010 sebesar 94,33%, tahun 2011 sebesar 85,95% dan tahun 2012 sebesar 82,13% cenderung mengalami penurunan, penurunan ini dapat diakibatkan oleh kenaikan nilai target yang semakin meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2012.
3. Pajak yang berkontribusi terbesar pada tahun 2010 adalah pajak Pengambilan Galian Gol.C, pada tahun 2011 adalah pajak Atas Tanah (BPHTB) dan pada tahun 2012 adalah pajak Restoran.

Saran

1. Dengan melihat data yang telah dianalisa dan dibahas, maka penulis menyarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kutai Barat agar lebih meningkatkan kemampuan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan pada semua jenis pajak daerah yang telah berjalan dengan cara memaksimalkan pendataan Wajib Pajak Baru, seperti restoran, toko-toko, kos-kosan, dan lain-lain pada daerah Kabupaten Kutai Barat.
2. Menyarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kutai Barat agar

lebih meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dengan memaksimalkan penagihan terhadap Objek Pajak, seperti Pajak Restoran/Rumah makan dan Pajak Sarang Burung Walet (rumahan) pada daerah Kabupaten Kutai Barat.

3. Mempermudah proses pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang akan membayar agar dengan senang hati membayar kewajibannya dan tidak menunggak sehingga realisasi dapat tercapai sesuai target.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Andy, Yogyakarta.
- Muindro Renyowijoyo, 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 1, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Soemitro Rochmat, 2000. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Erlangga, Jakarta.
- Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada